

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 26 Maret 2018
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membahas Rancangan Peraturan KPU
Ketua Rapat	: <b>H. Zainudin Amali, SE, M.Si / Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 26 dari 44 Anggota Komisi II DPR RI B. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri C. Ketua KPU RI D. Ketua Bawaslu RI

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI dengan agenda Membahas Rancangan Peraturan KPU, pada hari Senin, 26 Maret 2018, dibuka pada pukul 15.05 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Zainudin Amali, SE, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**

1. Terhadap Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ... tahun 2018 tentang Pengawasan Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitain dan Verifikasi Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum dan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, telah dilakukan pembahasan dan disetujui dengan catatan sebagai berikut:

- a. Bawaslu harus memastikan verifikasi faktual dukungan calon Dewan Perwakilan Daerah dilakukan dengan baik dan benar
  - b. Bawaslu harus lebih teliti dalam penulisan nomenklatur penyebutan lembaga penyelenggara pemilihan umum yaitu KPU/KIP serta Panwaslu atau Bawaslu
2. Terhadap Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, telah dilakukan pembahasan dan disetujui dengan catatan diberikan kesempatan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan masukan usulan baru secara tertulis beserta alasan perubahan, paling lambat diterima Kamis 29 Maret 2018 pukul 13.00 WIB untuk dilakukan pembahasan secara bersama dalam forum RDP pada tanggal 2-3 April 2018
3. Terhadap Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tahun 2018 tentang Norma, Standar Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, telah dilakukan pembahasan dan disetujui dengan catatan sebagai berikut:
- a. Surat suara: KPU harus memastikan proses pengadaan pencetakan, sortir, pelipatan dan distribusinya sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  - b. Bawaslu harus dapat memastikan pengawasan seluruh pengadaan, pencetakan, dan pendistribusian serta penggunaan logistik pemilihan umum oleh KPU

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 18.45 WIB.

**Jakarta, 26 Maret 2018**  
**KETUA RAPAT**

ttd

**H. ZAINUDIN AMALI, SE, M.SI**  
**A-292**